DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU :

Abdulah, Rozali, "Hukum Kepegawaian di Indonesia", (Jakarta, Rajawali Press). 2018.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2017.

Amin Damari, "Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)" Makassar; iRchisod Publishing) 2009.

Azhari, Aidul Fitriciada. TAFSIR KONSTITUSI: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.

Chaizi Nasucha, Pentingnya reformasi lembaga negara termasuk Polri, Reformasi Administrasi Publik, (Jakarta: Grasindo) 2022.

Charles B.Fleddermann, Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics), (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2015).

Devi Nur Hidayanti, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah DI Kota Tamgerang Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara" (Semarang: Universitas Semarang, 2018).

Eko Prasojo, Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokad & Efisiensi Struktural. (Jakarta: Sinar Katya), 2016.

Fajrul Falaakh dkk, Implikasi Reposisi TNI – Polri di Bidang Hukum, (Yogyakarta: FH UGM), 2018.

Frans Magnes Suseno, Etika abad ke 20, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006).

Hamdan Zoelfa, "Mengawal Konstitusionalisme". (Jakarta; Konstitusi Pers. 2016).

Hj Sedarmayanti, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Bandung : Penerbit Rafika Aditama).

Iswanto, dkk., (Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD NRI tahun 1945), Surakarta : Muhammasiyah University Press, 2019.

Jhonny Lamintang, Et al, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama), 2017.

Jimly Asshiddigie, 2014, "Peradilan Etika dan Etika Konstitusi", (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika)

Mahfud MD, "Pergulatan Politik dan Hukum di Indoensia", (Jakarta: Gama Media 2014)

Marbun, "Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan", (Bandung; Rajawali Pers, 2019).

Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, et.al., 2020. (Ed.) Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : UII Press)

Miftah Thoha, "Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia" (Semarang; Cahya Lentera, 2018).

Miriam Budiarjo, (Dasar-Dasar Ilmu Politik), Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Novi Yuliana Inkiriwang. Implementasi Baruan Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada OTA (Online Travel Agent), (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana) 2019.

Patria, A, "Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014", (Lampung ; PT. adhi cahya permata. 2019).

Prihatmoko, J. Joko. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. (Semarang: LP2I), 2017.

Purba, L. A, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung", Jakarta ; 2019.

Rizky Hidayati Ningsih, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)", (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2021).

S. Soekanto, Metode Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan (Bandung, Rajawali Pers) 2015.

Sadjijono, Etika Profesi Hukum suatu telaah Filosofi terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. (Jakarta: Laksbang Mediatama), 2019.

Sadjijono, Etika Profesi Hukum suatu telaah Filosofi terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. (Jakarta: Laksbang Mediatama) 2018.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020).

Satoto, Sukamto, "Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara", Yogyakarta: CV Hanggar Kreator, 2017

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, (Jawa Timur ; Penerbit Bayumedia Publishing, 2018).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta), 2016.

Suhud, R. "Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia, (Bandung: Mizan. 2019)

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015)

Warsito Utomo, Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompabilitas menjadi Budaya Birokrasi, (Jakarta ; Grafindo,2016).

Watunglawar, "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," Jakarta; 2017.

Yamin, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar". (Makasar: Irchisod Publishing), 2018.

Yandi Asda Mustika, Rasyidin, Suadi. Jurnal "Netralitas Aparatur Sipil Negara Daam Pemilihan Kepala Daerah", 2016.

JURNAL :

Agus Pramusinto, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004)

Jurnal Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: UINPress), 2022.

Kartiko, Galuh. "SistemPemilu dalam Perspektif Demokras di Indonesia." KONSTITUSI Jurnal, Vol. II Nomor 1, 2009

Nurrani, dkk, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting. Negara Hukum. Dalam Jurnal Perdana Gema, Vol. 4 No.1, 2020.

Oki Wahju Budijanto, "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016. V16.291-307 vol. 16, no. 3 (2016).

Patta, Abdul Kadir, "Masalah dan Prospek Demokrasi." Jurnal Academica Fisip UNTAD, Vol 1, No 1, 2009.

Raharjo, Agus dan Angkasa.PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum,Vol. 11 No. 3 September 2011, FH Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Soedarsono, Jurnal Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta, 2005)

Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi.", Jurnal Bawaslu-2017. Vol 3, No 1 hlm. 12

MEDIA ONLINE/MAJALAH :

M. Agus Yozam, Larangan dan Sanksi Bagi PNS yang Terlibat Politik Praktis, https://www hukumonline. com /berita/a/ini-larangan-dan-sangksi-bagi-pns-yang-terlibat-politik-praktis-lt5a4b2f8e1d353/?page=2, diakses tanggal 10 Februari 2024, pukul 19.00 WIB

Munawarman, Andi. Artikel Sejarah Singkat POLRI, di.http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal 11 Februari 2025

Tempo.id, "Money Politik dan Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat Kabupaten Cirebon pada Pemilu Legislatif 2014", Executive Summary Riset Partisipasi Masyarakat, (di akses pada: 9 Februari 2025)

PERARURAN PER- UNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang no 7 Tahun 2017 Tentang Netralitas ASN.

Surat Telegram Resmi (STR) Nomor 2407 Tahun 2023.

TAP MPR No.VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.